

HUT Korpri (1)

WAKTU saya masih kecil, PNS belum menjadi idola para mertua dalam mencari menantu. Karena gaji yang sangat kecil dan tidak memadai untuk menopang kehidupan. Apalagi profesi guru. Profesi ini sarat dengan ladang penuh pengabdian. Tak heran bila kemudian ada peribahasa dalam bahasa Jawa yang berarti “*digugu lan ditiru*”.

Bisa dipahami karena mata pencaharian pokok masyarakat saat itu memang mayoritas petani dengan rata-rata kepemilikan tanah yang masih cukup untuk menopang kehidupan. Kakek saya petani dengan luasan tanah sekitar lima hektare. Masih ideal menopang hidup. Dengan anak sepuluh, ketika diwariskan masing-masing hanya mendapat setengah hektar.

Kemudian dari ibu kepada saya dengan lima bersaudara. Seandainya saya dan adik-adik semua berprofesi sebagai petani, berapa tanah yang saya miliki. Dan apakah bisa menopang kehidupan. Melihat kondisi bapak saya yang kebetulan prajurit, kemudian *nyambi* sebagai petani dengan tanah yang dibeli dan warisan, sulit membiayai

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

hidup keluarga ketika itu.

Tradisi kraton yang menempatkan para kerabat keturunan menjadi pejabat kadipaten dan pemerintahan membuat tradisi priyayi ini sampai di level terbawah. Pekerjaan halus yang tidak berkutut dengan lumpur, dengan gaji dan kekuasaan, menjadikan priyayi mampu membiayai gaya hidup.

Priyayi identik dengan asal-usul sampai dengan raja-raja besar Jawa sebelum penjajahan. Ketika Belanda menjajah, priyayi menjadi instrumen administrasi kekuasaannya (Clifford Geertz-The Religion of Java-1959). Diberikan hak berhubungan langsung dengan rakyat, untuk menarik pajak serta upeti. (***/naz**)

HUT Korpri (2)

KETIKA Indonesia merdeka, ternyata kemerdekaan tak serta-merta menggunakan seluruh potensi untuk membangun negeri. Justru sebaliknya, budaya priyayi dibawa ke birokrasi. Jabatan di birokrasi tak ubahnya seperti teori hubungan patron-klien (James C. Scott-1972).

Kunci memahami teori patron-klien adalah hubungan timbal-balik (resiprokal) antara patron dengan kliennya. Baik patron maupun klien sama-sama menyediakan layanan pada satu sama lain. Scott mengakui bahwa keuntungan lebih besar diperoleh patron ketimbang klien.

Patron juga dimungkinkan memiliki kemampuan kekerasan atau pemaksaan karena memiliki kekuasaan. Hal ini juga berlaku dari atasan kepada bawahan. Sehingga, seolah ada kewajiban yang di bawah memberikan timbal balik ke atasan dalam bentuk upeti.

Di era orde baru, hubungan ini memang dipelihara. Mulai di tingkat pusat sampai daerah. Seperti hubungan hirarki dan tali-temali yang kompleks namun saling menguntungkan lingkungan birokrasi itu sendiri. Tentu, akibatnya rakyat yang terus menjadi korban.

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Tak heran, bila suatu jabatan diberikan, semua mempunyai kewajiban memberikan timbal balik keuntungan kepada pemberi. Pada titik di bawah, bila pelayanan diberikan, kewajiban yang diberi layanan memberikan timbal balik sesuatu. Bentuk pemberian bisa suka rela atau bahkan sudah dipatok.

Birokrasi pasca kemerdekaan sampai orde baru sama sekali tidak berubah. Gaji kecil sebagai pegawai sengaja dibiarkan, toh birokrasi dapat mencari tambahan untuk hidup melalui upeti yang sudah berjalan melembaga. Program pemerintah untuk menjadikan birokrasi bersih dan melayani sejak dulu digaungkan namun seperti segera hilang ditelan bumi. (***/naz**)

JAWA POS

RADAR MADIUN

RADAR MAGETAN

Sabtu, 3 Desember 2022

HUT Korpri (3-Habis)

REFORMASI lahir, perubahan itu tiba. Namun tak serta merta dalam sekejap. Persoalan gaji menjadi sebab utama sulit berubahnya birokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian mencoba mengubah struktur penggajian di birokrasi.

Di era pemerintahan Gus Dur, gaji PNS mengalami kenaikan tertinggi. Bahkan kenaikan sebesar 270,4 persen, berlaku dari golongan terendah, Rp 135.000,00 ke Rp 500.000,00.

Bahkan seingat saya, tunjangan jabatan dinaikkan berlipat. Harapannya agar pejabat tidak lagi korupsi. Melayani rakyat. Sayang sekali, tunjangan jabatan ini hanya bertahan beberapa bulan, akhirnya tunjangan jabatan kembali seperti semula.

Apakah kemudian birokrasi telah berubah, dengan berbagai fasilitas dan berbagai macam tunjangan menyer-tai? Tentu jawaban pertanyaan ini ada pada masyarakat luas. Tidak adil kalau yang menilai adalah birokrasi sendiri.

Tanggal 29 November 2022, Korpri sebagai satu-satunya organisasi PNS memperingati ulang tahun ke-51. Usia yang sudah sangat dewasa untuk ukuran sebuah organisasi. Dengan mengusung tema *Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri*, tentu tema ini sangat relevan di tengah

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

susahnyanya kehidupan masyarakat di era pandemi Covid-19.

Saya sering mengatakan, menyempang kita semua ditakdirkan Tuhan memegang kekuasaan, mengapa tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas. Membuat monument kebaikan.

Soekarno-Hatta para proklamator. Soeharto punya monumen dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Pertanyaan kemudian, mengapa kita tidak membuat monumen sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Tidak ada kata terlambat. Kalau saat ini kita di belakang segera mengambil langkah, lari cepat menyusul yang di depan. Dan yang dituntut birokrasi oleh rakyat itu sederhana, bekerjalah untuk kepentingannya. Bukan sebaliknya!!! Itulah melayani. Selamat Ulang Tahun ke-51 Korpri. (***naz**)